

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan (UU No. 1 Tahun 2011).

Masalah perumahan dan permukiman berkaitan dengan proses pembangunan, serta kerap merupakan cerminan dari dampak keterbelakangan pembangunan umumnya. Munculnya masalah perumahan dan permukiman disebabkan oleh` (Hariyanto, 2009):

1. Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.
2. Keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
3. Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan pentingnya hidup sehat.
4. Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.

## 2.2 Permukiman Atas Air

Studi standar spesifikasi teknis yang disusun oleh Ditjen Cipta Karya Departemen PU (1998:2) menyebutkan definisi permukiman diatas perairan, ditinjau dari karakteristik permukiman beserta aspek-aspek yang mempengaruhi dan membentuknya adalah bangunan terapung atau panggung yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunin dan sarana pembinaan keluarga, yang berada diatas badan perairan berupa sungai, danau, rawa ataupun pantai/laut dengan sifat seluruhnya ataupun sebagian selalu ada waktu-sewaktu berada di atas air.

### 2.2.1 Karakteristik permukiman atas air

Studi yang dilakukam Ditjen Cipta Karya (1999) pada lima kota yaitu Kota Balikpapan, Banjarmasin, Ujung Pandang, Jayapura, dan Palembang menghasilkan bahwa karakteristik wilayah yang dimiliki kawasan permukiman di atas perairan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki karakteristik wilayah dengan lahan darat efektif untuk permukiman terbatas, seperti wilayah yang didominasi perairan atau wilayah perbukitan lainnya.
2. Perkembangan kota dan pusat kota di daratan yang sangat pesat dan kawasan permukiman perairan tumbuh mendekati pusat kota atau tumbuh sebagai pusat kota lama.
3. Permukiman diatas perairan berkembang secara spontan (*organic*) dan tumbuh tidak terencana (*unplanned*) di tepian-tepian sungai atau danau (pesisir).
4. Perairan merupakan sarana penting bahkan utama dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana transportasi, wilayah kegiatan ekonomi, maupun sebagai bagian dari kehidupan budaya masyarakatnya.

### 2.2.2 Pola permukiman di atas air

Pola permukiman di atas air sangat dipengaruhi oleh eksistensi historisnya masing-masing dan karakteristik topografinya. Berdasarkan eksistensi historisnya permukiman terbagi atas (Suprijanto, 2000):

1. Permukiman tradisional

Permukiman tradisional di atas air memiliki ciri-ciri antara lain: homogenitas dalam pola bentuk dan ruang serta fungsi rumah/bangunan; adanya nilai-nilai tradisi khusus yang dianut terkait dengan hunians seperti orientasi, ornamentasi, konstruksi dan lain-lain; pola persebaran rumah cenderung membentuk suatu cluster berdasarkan kedekatan keluarga atau kekerabatan.

## 2. Permukiman non-tradisional

Pola permukiman non tradisional dia atas air memiliki ciri-ciri, yaitu: heterogenitas dalam pola dan bentuk runag serta fungsi rumah/bangunan; arsitektural dibuat dengan kaidah tradiosional maupun modern, sesuai dengan latar belakang budaya suku/etnis budaya masing-masing. Segala hal didasarkan atas dasar kpraktidan dan kemudahan, tidak ada nilai-nilai tradisi khusus yang dianut berkaitan dengan hunian.

### 2.3 Partisipasi Masyarakat

Berikut ini merupakan pengertian partisipasi masyarakat yaitu:

1. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
2. Menurut Soelaiman (1985) partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun diluar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.
3. Partisipasi masyarakat menurut Soemarto (2009) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Keuntungan atau manfaat yang diperoleh dengan pendekatan partisipasi menurut Suryawan (2004) adalah:

1. Suatu program pembangunan akan lebih efektif dan efesien dalam penggunaan sumber daya secara terpadu oleh berbagai pihak;
2. Pembangunan akan lebih menyentuh masyarakat tapi tetap sesuai dengan rencana makro yang dibuat karena adanya masukan dari pemerintah dan profesional;
3. Masyarakat sadar akan persoalan yang akan mereka hadapi serta potensi apa saja yang dimiliki oleh masyarakat tersebut;
4. Masyarakat akan lebih bertanggungjawab akan keberhasilan pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan tersebut;

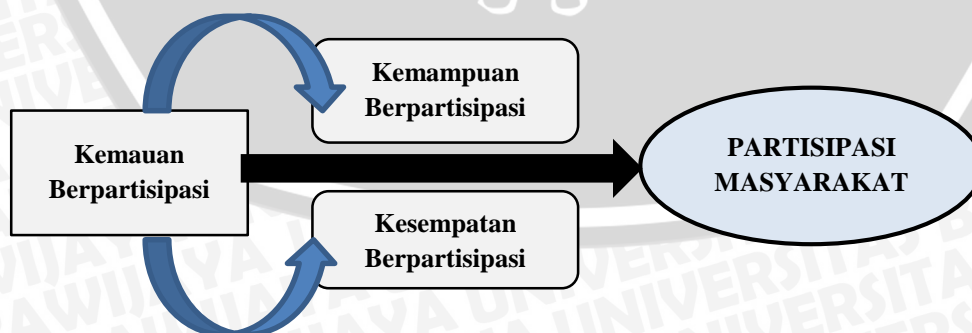
5. Tumbuhnya solidaritas serta terciptanya masyarakat yang mandiri karena mampu mengambil keputusan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

### 2.3.1 Syarat partisipasi masyarakat

Menurut Sahidu (1998) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, needs, rewards dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.

Margono Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (**Gambar 2.1**).



**Gambar 2. 1** Skema syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi

Sumber: Slamet (1985)

Slamet (1985) menjelaskan tiga persyaratan yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi adalah sebagai berikut.

#### 1. Kemauan

Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab, kesempatan dan kemampuan yang cukup, belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk (turut) membangun. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan aktif memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan. (Mardikanto, 2003). Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang:

- a. Kemauan masyarakat untuk membawa perubahan untuk pembangunan yang lebih baik.
- b. Loyalitas terhadap penguasa atau pelaksana.
- c. Memiliki sifat gotong royong dan mengutamakan kepentingan bersama dibanding individu
- d. Memiliki sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

#### 2. Kesempatan

Adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh:

- a. Teladan dari penguasa atau pelaksana yang dapat menumbuhkan sikap loyalitas dari masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
- b. Masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi-informasi pembangunan, kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya.
- c. Masyarakat mendapat kesempatan berorganisasi untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### 3. Kemampuan

Mardikanto (2003) menjelaskan beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik itu antara lain adalah:

- a. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun dan memperbaiki mutu hidupnya.
- b. Masyarakat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Robbins (1998) kemampuan adalah kapasitas individu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut Robbins (1998) menyatakan pada hakikatnya kemampuan individu tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Menurut Sunarti (2012) usaha meningkatkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan beberapa kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum masyarakat melibatkan diri mereka secara sukarela dalam suatu aktifitas kegiatan, yaitu:

1. Kesadaran dari masyarakat bahwa situasi yang sekarang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan tujuan mereka.
2. Masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan yang direncanakan.
3. Terdapat organisasi setempat yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

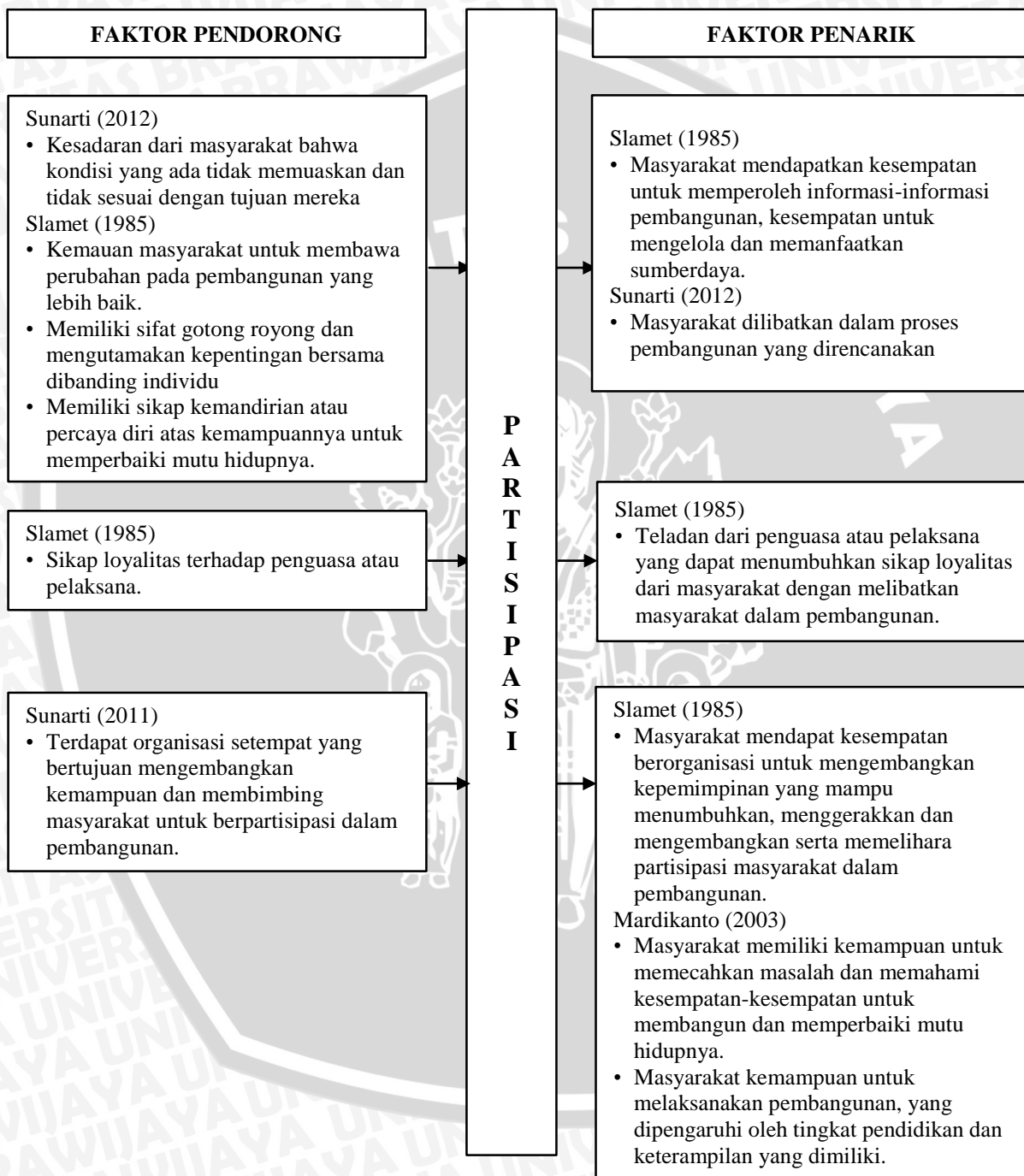
Berdasarkan pembahasan dari literatur sebelumnya, dapat disimpulkan faktor apa saja yang merupakan faktor pendorong dan faktor penarik timbulnya partisipasi masyarakat (**Gambar 2.2**).

#### 2.3.2 Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat

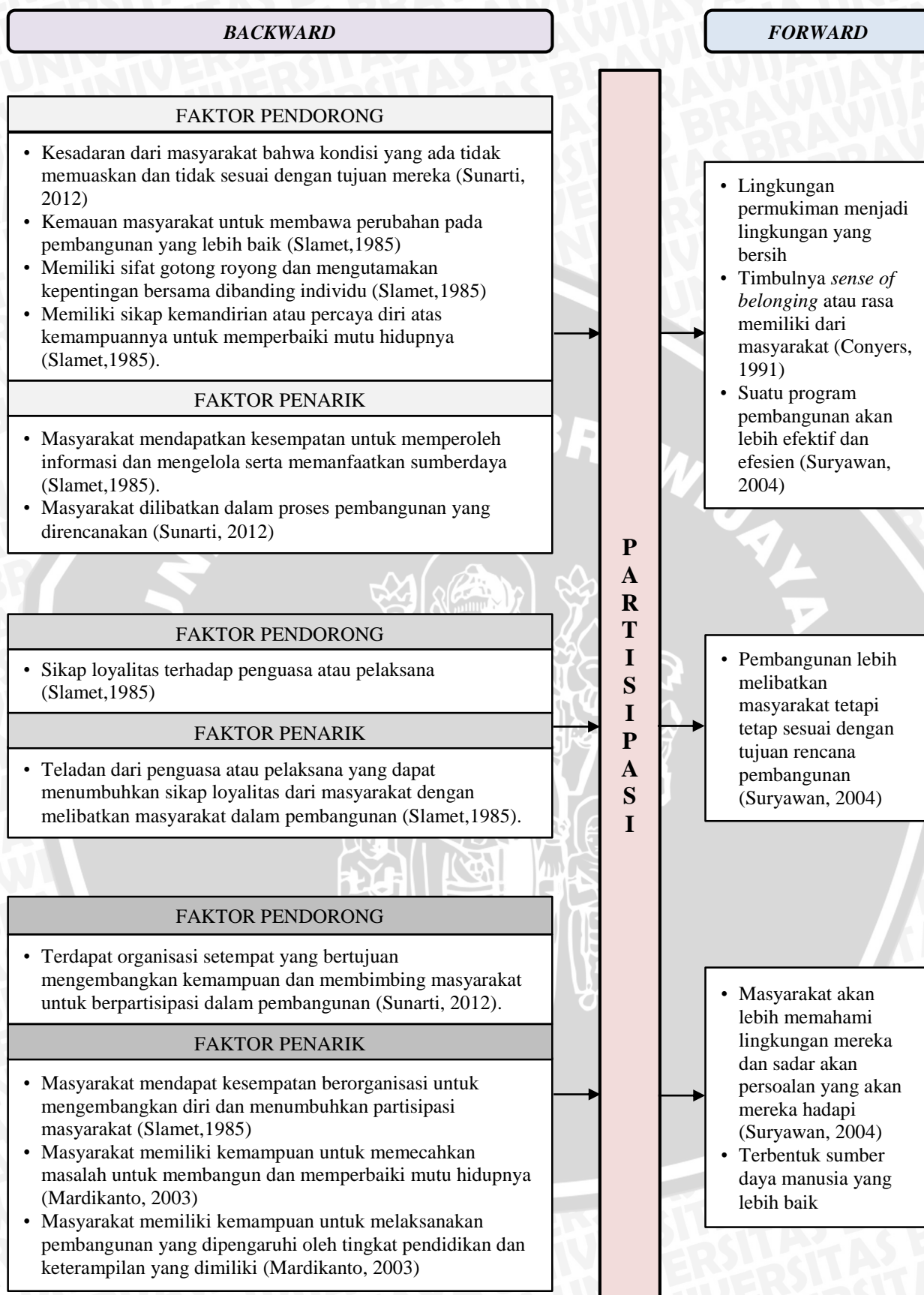
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi dijelaskan Guzman (1989) dalam Sunarti (2012) yaitu:

1. Kesalahan dasar dan kekurangan dalam konsep dan kebijakan pembangunan termasuk dalam implementasinya.
2. Kesalahan asumsi mengenai partisipasi masyarakat; masyarakat tidak berpartisipasi karena merasa kekurangan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah dasar, memobilisasi sumber daya, merencanakan kegiatan, dan sebagainya.
3. Kekurangan atau ketiadaan strategi dan pendekatan yang efektif untuk menumbuhkan atau mendatangkan partisipasi.
4. Pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan yang kurang dilatih dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat.

5. Sebagian besar organisasi atau lembaga yang membebani atau memaksakan kehendaknya pada masyarakat dan penyalahgunaan hak kekuasaan.
6. Pihak penguasa yang hanya memprioritaskan atau melayani sebagian besar kebutuhan untuk kelompok elit.



**Gambar 2. 2** Faktor pendorong dan penarik partisipasi  
 Sumber: Slamet (1985), Mardikanto (2003) dan Sunarti (2012)



**Gambar 2.3 Backward dan forward partisipasi**

Sumber: Slamet (1985), Mardikanto (2003), Suryawan (2004) dan Sunarti (2012)



Menurut Sastropoetro (1988) hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Hambatan ini dapat merupakan faktor yang mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan berpikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya.

2. Pola masyarakat yang heterogen

Hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada.

3. Sistem birokrasi

Faktor ini dapat dijumpai di lingkungan pemerintahan, birokrasi seringkali yang ada melampaui standar serta terpaku pada prosedur formal yang kompleks.

Selain itu, ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu (Sastropoetro, 1988):

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.
4. Kesiediaan melakukan sesuatu yang tumbuh secara tulus tanpa dipaksa orang lain.
5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

### 2.3.3 Derajat partisipasi masyarakat

Arstein (1969) menggambarkan delapan tingkatan yang setiap tingkatannya menggambarkan peningkatan pengaruh masyarakat dalam menentukan produk akhir pembangunan. **Tabel 2.1** menggambarkan delapan tingkatan partisipasi masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam tiga level yaitu non participation, tokenism dan citizen power.

**Tabel 2. 1 Tangga partisipasi Arnstein**

1	Manipulasi	<b>Non Participation</b>
2	Terapi	
3	Pemberian informasi	<b>Tokenisme</b>
4	Konsultasi	
5	Penentrnaan	
6	Kemitraan	<b>Citizen Power</b>
7	Pelimpahan Kekuasaan	
8	Kontrol masyarakat	

Sumber: Arnstein (1969)

Berdasarkan delapan tingkatan tersebut, Arnstein (1969) membagi menjadi tiga kelompok partisipasi yaitu *non participation*, *tokenism* dan *citizen power*.

1. *Non participation* (tidak ada partisipasi)

Tingkatan terendah yang didefinisikan sebagai *non-participation* atau tiadanya partisipasi. Pada tingkatan ini tidak ada partisipasi dari masyarakat dalam merencanakan maupun melaksanakan program dan tidak terjadi dialog atau umpan balik antara penguasa atau pemerintah dengan masyarakat.

2. *Tokenisme* (partisipasi semu)

Pada tingkatan *tokenism* ada tindakan dari masyarakat untuk mulai terlibat dalam partisipasi yang memungkinkan masyarakat yang semula tidak didengarkan menjadi didengarkan dan memiliki suara. Namun pada tingkatan ini, tidak ada jaminan bahwa suara mereka akan didengarkan oleh penguasa.

3. *Citizen power* (kekuasaan masyarakat)

Pada tingkatan *citizen power* atau terdapat partisipasi aktif, masyarakat dapat bermitra dengan penguasa yang memungkinkan mereka bernegosiasi dan masyarakat memiliki kekuasaan penuh untuk membuat keputusan.

Berdasarkan tingkatan tersebut, Arnstein (1969) menguraikan menjadi delapan tipe partisipasi yaitu:

1. *Manipulation* atau manipulasi

Manipulasi merupakan tingkat yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat, dalam hal ini tidak ada peran serta dari masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. *Therapy* atau penyembuhan

Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya dalam kegiatan tersebut penguasa lebih banyak mengubah pola pikir masyarakat agar berjalan sesuai rencana keinginan penguasa dibandingkan mengumpulkan opini dari masyarakat.

3. *Informing* atau pemberian informasi

Terjadi pemberian informasi satu arah dari pihak penguasa kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan masyarakat untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi. Dalam situasi tersebut informasi hanya diberikan pada akhir perencanaan, dimana masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana kegiatan.

4. *Consultation* atau konsultasi

Setelah memberikan informasi kepada masyarakat, masyarakat diundang untuk memberikan opini. Akan tetapi tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.

5. *Placation* atau penentraman

Masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota lainnya berasal dari wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun opini dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat sering kali tidak didengar karena kedudukannya yang masih dianggap rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. *Partnership* atau kemitraan

Atas kesepakatan bersama terjadi pembagian kekuasaan atau wewenang antara pihak masyarakat dengan pihak penguasa. Dalam hal ini telah disepakati untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

7. *Delegated power* atau pelimpahan kekuasaan

Pada tingkat ini masyarakat diberikan kewenangan untuk membuat keputusan pada perencanaan kegiatan. Penguasa mengadakan diskusi dengan masyarakat untuk memecahkan perbedaan yang muncul dengan tidak memberikan tekanan-tekanan.

8. *Citizen control* atau kontrol masyarakat

Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur kegiatan atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang ingin melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar tanpa melewati pihak ketiga.

### 2.3.4 Tanda-Tanda (Indikator) Partisipasi Masyarakat

Mengukur skala partisipasi masyarakat secara fisik dapat diketahui dari kriteria penilaian tingkat partisipasi untuk setiap individu (anggota kelompok) yang diberikan oleh Chapin dalam Slamet (1994) yaitu keanggotaan dalam organisasi dan kepengurusan, frekuensi kehadiran (*attendance*) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan, sumbangan/iuran yang diberikan, kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang

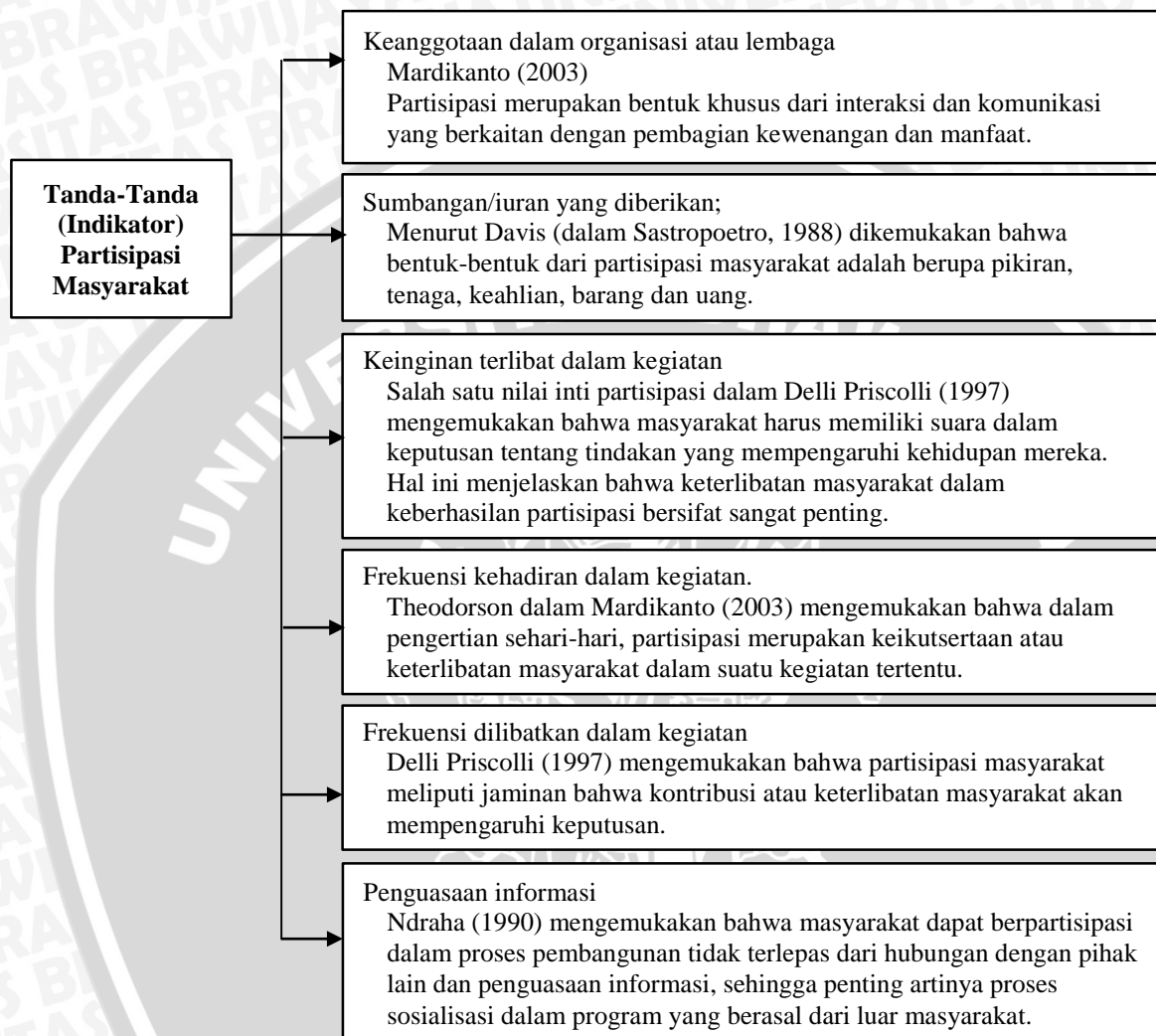
direncanakan, keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan. Menurut Advianty (2013), kondisi pendukung partisipasi yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu frekuensi dilibatkan, keinginan terlibat, penguasaan informasi, frekuensi kehadiran, dan jumlah jenis sumbangan.

Berikut merupakan penjelasan variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur derajat partisipasi masyarakat yaitu (**Gambar 2.4**).

1. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga  
Verhagen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.
2. Sumbangan/iuran yang diberikan;  
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM PPK, 2007). Menurut Davis (dalam Sastropetro, 1988) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang.
3. Keinginan terlibat dalam kegiatan  
Salah satu nilai inti partisipasi dalam Delli Priscolli (1997) mengemukakan bahwa masyarakat harus memiliki suara dalam keputusan tentang tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan partisipasi bersifat sangat penting.
4. Frekuensi kehadiran dalam kegiatan.  
Mardikanto (2003) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.
5. Frekuensi dilibatkan dalam kegiatan  
Frekuensi dilibatkan masyarakat dalam kegiatan merupakan salah satu tolak ukur penting dalam keberhasilan partisipasi. Hal ini dikemukakan oleh Delli Priscolli (1997) sebagai salah satu nilai inti partisipasi bahwa partisipasi masyarakat meliputi jaminan bahwa kontribusi atau keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi keputusan.

## 6. Penguasaan informasi

Menurut Ndraha (1990), masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan tidak terlepas dari hubungan dengan pihak lain dan penguasaan informasi, sehingga penting artinya proses sosialisasi dalam program yang berasal dari luar masyarakat.



**Gambar 2. 4 Tanda-tanda (indikator) partisipasi**

Sumber: Priscolli (1997), Mardikanto (1994) dan Sastropetro (1988)

### 2.3.5 Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Ross (1967) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal. Faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh Ross (1967) termasuk dalam faktor internal, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Menurut Slamet (1994) faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian.

### 1. Usia

Menurut Ross (1967) faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dimana dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman dan akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan (Slamet, 1994).

### 2. Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan akan berbeda, hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. maka akan ada kecenderungan dimana kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi (Slamet, 1994).

### 3. Tingkat pendidikan

Ross (1967) mengemukakan bahwa pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi (Slamet, 1994).

### 4. Tingkat penghasilan

Menurut Slamet (1994), masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga, sedangkan masyarakat berpenghasilan tinggi lebih memilih berpartisipasi dalam hal uang. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

### 5. Pekerjaan

Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya (Slamet, 1994).

## 6. Lama tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut (Ross, 1967).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat menurut Nasution (2004) yaitu karakteristik individu yang meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan tingkat pendapatan, lamanya menetap. Berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Usia adalah lamanya hidup responden yang dihitung sejak kelahirannya sampai saat dilakukan penelitian yang dinyatakan dengan satuan tahun. Sub variabel ini dapat digunakan untuk menganalisis usia muda, menengah, dan tua dalam melakukan partisipasi. Deskripsi penggolongan usia responden dalam satuan tahun yaitu a) kategori usia muda (20 hingga 36 tahun), b) usia menengah (37 hingga 53 tahun), serta c) usia tua (54 hingga 70 tahun).
2. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditempuh melalui pendidikan formal. Lamanya responden menyelesaikan pendidikan terakhir berdasarkan satuan tahun. Sub variabel tersebut digunakan untuk menganalisis jenjang pendidikan mulai dari tidak tamat sekolah dasar sampai sarjana. Klasifikasi tingkat pendidikan yaitu a) tidak tamat SD, b) tamat SD, c) SMP, d) SLTA, serta e) Diploma/sarjana.
3. Jenis pekerjaan adalah kegiatan mata pencaharian responden yang dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai tolak ukur kesibukan dari bekerja penuh maupun bekerja tidak penuh. Dengan konsep kerja tersebut dapat digunakan untuk menganalisis jenis pekerjaan responden meliputi: nelayan, buruh, wiraswasta, pedagang, swasta, serta PNS, TNI/POLRI.
4. Tingkat pendapatan adalah gaji atau upah dalam bentuk uang rupiah yang diperoleh dari pekerjaan responden untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup per bulan, diukur dalam satuan rupiah. Klasifikasi tingkat pendapatan meliputi: a) < Rp 500.000, b) Rp 500.000-Rp 1.000.000, c) Rp 1.000.000-Rp 1.500.000, d) < Rp 1.500.000-Rp 2.000.000, serta > Rp 2.000.000.
5. Lamanya tinggal adalah lamanya responden menetap atau bertempat tinggal dirumahnya sekarang berdasarkan satuan tahun. Klasifikasi lamanya tinggal yaitu: a) 3-16 tahun, b) 17-30 tahun, c) 31-44 tahun, d) 45-58 tahun, dan e) 59-72 tahun.

## 2.4 Perbaikan Lingkungan Permukiman

Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Perumahan merupakan wadah fisik, sedang permukiman merupakan paduan antara wadah dengan isinya yakni manusia yang hidup bermasyarakat dengan unsur budaya dan lingkungannya. Permukiman berwawasan lingkungan merupakan permukiman yang mampu mengakomodasikan dan mendorong proses perkembangan kehidupan didalamnya secara wajar dan seimbang dengan memadukan kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial (Hadi, 2012).

Silas (2001) menyebutkan bahwa sebuah rumah disebut layak huni bila ada keterpaduan yang serasi antara:

1. Perkembangan rumah dan penghuninya, artinya rumah bukan hasil akhir yang tetap tetapi proses yang berkembang.
2. Rumah dan lingkungan (alam) sekitarnya, artinya lingkungan rumah dan lingkungan sekitarnya terjaga selalu baik.
3. Perkembangan rumah dan perkembangan kota, artinya kota yang dituntut makin global dan urbanized memberi manfaat positif bagi kemajuan warga kota di rumah masing-masing.
4. Perkembangan antar kelompok warga dengan standar layak sesuai keadaan dan tuntutan masing-masing kelompok, artinya tiap kelompok warga punya kesempatan sama untuk berkembang sesuai dengan tuntutan yang ditetapkan sendiri.
5. Standar fisik dan dukungan untuk maju bagi penghuni, artinya standar fisik rumah tidak sepele dan menentukan seperti peningkatan produktivitas yang diberikannya terhadap mobilitas penghuninya.

## 2.5 Penyuluhan Permukiman atas Azas Tribina

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kampung kota pada dasarnya merupakan usaha peningkatan mutu kehidupan masyarakat kampung melalui kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu yang terdiri dari komponen fisik dan non fisik. Tujuannya antara lain adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan prasarana lingkungan dan pelayanan dasar bagi masyarakat kampung dan mendorong serta membina partisipasi masyarakat, agar dapat meningkatkan kemampuan pendapatan dan produktivitas masyarakatnya.

Tribina adalah pemaduan pembinaan lingkungan fisik dengan pembinaan sosial, pembinaan usaha yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan perbaikan kampung.



Konsep ini secara resmi menjadi acuan pemerintah. Konsep ini dikembangkan mengikuti pergeseran sasaran perbaikan kampung yang semula lebih banyak ditujukan untuk peningkatan kualitas fisik kampung kemudian beralih ke peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung. Untuk itu perbaikan kampung tidak dapat hanya ditujukan pada perbaikan prasarana dan fasilitas yang bersifat fisik semata, tetapi juga mencakup perbaikan kondisi sosial dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kampung.

Konsep pendekatan yang di gunakan dalam perbaikan kampung yang dapat digunakan untuk tujuan seperti di atas adalah penyuluhan permukiman dengan azas Tribina terkandung unsur-unsur:

1. Bina manusia, yaitu penyiapan masyarakat, baik yang di lakukan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat, memampukan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan ketrampilan teknis, serta memberikan tempat dan kesempatan masyarakat untuk ikut menentukan kegiatan yang di butuhkan.
2. Bina usaha, yaitu kegiatan dalam rangka membangun dan mengembangkan kegiatan usaha masyarakat yang di laksanakan secara terpadu dengan instansi terkait. Pemerintah menunjang melalui penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana serta berbagai fasilitas yang mendukung aktifitas ekonomi.
3. Bina lingkungan, yaitu upaya perbaikan dan pengembangan prasarana dan sarana lingkungan dalam rangka mempercepat tercapainya lingkungan permukiman yang layak dalam lingkungan sehat, yang di harapkan dapat mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat.

## **2.6 Strategi Perencanaan Kawasan Permukiman yang Ramah Lingkungan**

Beberapa strategi perencanaan kawasan permukiman yang ramah lingkungan dapat dilihat pada prinsip-prinsip dibawah ini (Grant, 1996):

1. Mengelola dan memelihara lingkungan supaya berfungsi dengan semestinya. Seperti contohnya tempat pembuangan sampah, drainase lingkungan dan sistem pembuangan.
2. Meminimalisasikan pengaruh bangunan pada lingkungan disekitarnya  
Seperti contohnya: pemanfaatan ruang, fasilitas pelayanan, jaringan infrastruktur sebaiknya direncanakan secara efisien.
3. Melindungi sumber-sumber alam dan sumberdaya lahan untuk generasi selanjutnya  
Seperti contohnya: melindungi pemakaian sumber daya air, tanah dan udara.

4. Mengurangi limbah yang dihasilkan oleh bangunan hunian  
Seperti contohnya: mengolah limbah yang berasal dari bangunan-bangunan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan disekitarnya, menanam tanaman-tanaman yang dapat melindungi ekologi kawasan.
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menggalakkan pemeliharaan lingkungan  
Seperti contohnya mensosialisasikan pentingnya permukiman yang berkelanjutan sehingga masyarakat juga turut serta memelihara lingkungan.
6. Mensosialisasikan pentingnya lingkungan sosial yang “sehat”  
Seperti contohnya: Keamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan partisipasi masyarakat.

### 2.7 Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu merupakan studi literatur dair jurnal, thesis maupun disertasi yang digunakan sebagai referensi penelitian dalam hal perumusan tujuan, pemilihan variabel dan penggunaan teknik analisis data. Referensi yang didapatkan berdasarkan studi terdahulu yaitu (**Tabel 2.2**):

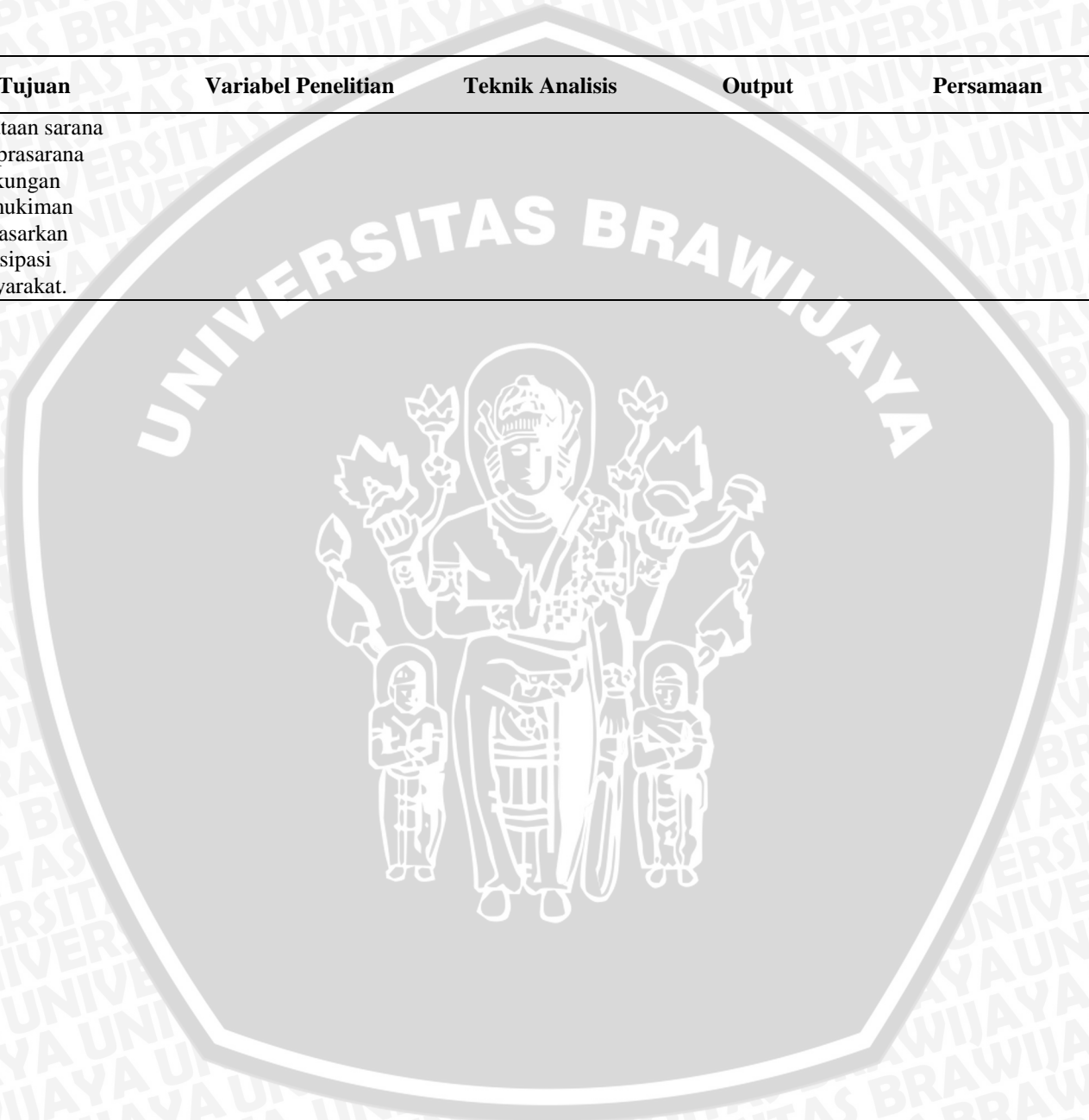
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Permukiman Kumuh Kelurahan Ploso (Advianty dan Handayeni, 2013)  
Persamaan yang terdapat di penelitian dengan studi terdahulu yaitu penggunaan teknik analisis dan penggunaan variabel penelitian kondisi pendukung partisipasi. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu tujuan dan output penelitian.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS) Di Desa Bajo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo (Ibrahim Surotinojo, 2009)  
Persamaan yang terdapat di penelitian dengan studi terdahulu yaitu penggunaan eknik analisis dan penggunaan variabel penelitian faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Perbedaan dari penelitian dengan studi terdahulu yaitu tujuan dan output penelitian, serta tidak menggunakan variabel bentuk partisipasi masyarakat untuk dianalisis dalam penelitian.
3. Penataan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Di Tepian Sungai Kota Pangkalan Bun (Eny Rusmita, 2012)  
Persamaan yang terdapat di penelitian dengan studi terdahulu yaitu menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dengan Arnstein (1969). Perbedaan yang terdapat pada penelitian dengan studi terhadulu yaitu penggunaan teknik analisis yaitu tidak menganalisis sarana dan prasarana permukiman.

Tabel 2. 2 Studi Terdahulu

No	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Output	Persamaan	Perbedaan
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Permukiman Kumuh Kelurahan Ploso <b>(Advianty dan Handayeni,</b> JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada permukiman kumuh Kelurahan Ploso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kekumuhan</li> <li>• Tingkat partisipasi (tidak ada informasi, informasi, sosialisasi, jaring aspirasi, pelibatan dalam perencanaan, pelibatan dalam pengambilan keputusan, pelibatan dalam pengawasan, pelibatan dalam evaluasi)</li> <li>• Kondisi pendukung partisipasi (<b>frekuensi dilibatkan, keinginan terlibat, penguasaan informasi, frekuensi kehadiran, jumlah jenis sumbangan</b>)</li> <li>• Kondisi sosial ekonomi masyarakat (<b>jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama tinggal, jenis mata pencaharian, tingkat pendapatan penduduk</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Skoring</li> <li>• Analisis Tabulasi Silang (Crosstabulation)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat partisipasi disesuaikan dengan tingkat kekumuhan.</li> <li>• Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi</li> </ul>	Teknik analisis dan penggunaan variabel penelitian kondisi pendukung partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dan output penelitian</li> </ul>
2	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS) Di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo	Mengkaji bentuk dan tingkat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program SANIMAS di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk partisipasi masyarakat: tenaga, pikiran, keahlian, barang/materi, uang</li> <li>• Tingkat partisipasi (<b>kehadiran dalam pertemuan, sumbangan yang diberikan, keterlibatan dalam kegiatan fisik, keaktifan dalam diskusi, keanggotaan dalam</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala likert</li> <li>• Tabulasi silang (crosstab-<i>Chi-square</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk partisipasi masyarakat</li> <li>• Tingkat partisipasi masyarakat</li> <li>• Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program SANIMAS</li> </ul>	Teknik analisis dan penggunaan variabel penelitian faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dan output penelitian</li> <li>• Tidak menggunakan variabel bentuk partisipasi masyarakat</li> </ul>

No	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Output	Persamaan	Perbedaan
	(Ibrahim Surotinojo) Thesis, Universitasi Diponegoro, 2009)		<p><b>organisasi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat (<b>jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama tinggal, mata pencaharian, tingkat pendapatan, suku, agama, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus desa, konsultan)</b></li> </ul>				
3	Penataan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Di Tepian Sungai Kota Pangkalan Bun (Eny Rusmita, 2012) Master Thesis of Architecture, RTA 307.336 Rus p, 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik fisik dan non-fisik permukiman</li> <li>Menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman</li> <li>Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat</li> <li>Merumuskan partisipasi masyarakat yang sesuai, guna menyusun konsep penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman</li> <li>Menyusun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana prasarana: ketersediaan air bersih, ketersediaan persampahan, tingkat, ketersediaan fasilitas umum dan ruang terbuka, ketersediaan sanitasi, ketersediaan jaringan jalan, ketersediaan sarana pendidikan.</li> <li>Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis karakteristik fisik dan non fisik permukiman</li> <li>Analisis sarana dan parasarana faktor</li> <li>Analisis partisipasi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel yang berpengaruh terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat</li> <li>Perumusan partisipasi masyarakat untuk menyusun konsep penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman</li> <li>Penataan sarana sarana da prasarana lingkungan permukiman berdasarkan partisipasi masyarakat</li> </ul>	Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan Arnstein (1969)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teknik analisis</li> <li>Tidak menganalisis sarana dan prasarana permukiman</li> </ul>

No	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Output	Persamaan	Perbedaan
		penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman berdasarkan partisipasi masyarakat.					



## 2.8 Kerangka Teori

